

DAFTAR PUSTAKA

- . Kamus Besar Bahasa Indonesia. [Online]. Tersedia di <https://kbbi.web.id/>. Diakses 1 Maret 2020
- Adiputra, I.M.P, S. Utama, H. Rossieta . (2018). *Transparency of local government in Indonesia*. *Asian Journal of Accounting Research*, Vol. 3, No. 1, h.123–138
- Afriansyah, R. D dan Haryanto. (2013). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengungkapan Informasi Akuntansi Di Internet Oleh Pemerintah Daerah. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengungkapan Informasi Akuntansi Di Internet Oleh Pemerintah Daerah*, Vol. 2 No.3, h. 702–712
- Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia. Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. <http://www/bpk.go.id> diakses pada 28 Oktober 2019..
- Bertot, J. C., Jaeger, P. T., & Grimes, J. M. (2010). *Using ICT to create a culture of transparency: E-government and social media as openness and anti-corruption tools for societies*. *Government Information Quarterly*, Vol. 27. No. 2010, h. 264–271
- Carpenter, V. L., & Feroz, E. H. (2001). *Institutional theory and accounting rule choice: An analysis of four US state governments' decisions to adopt generally accepted accounting principles*. *Accounting, Organizations and Society*, Vol. 26. No. 7–8, h. 565–596
- Dhiyantiputri, S. 2018. "Determinan Luas Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2014-2016". *Disertasi yang Tidak Dipublikasikan*, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Diponegoro
- García, A.G. dan Garcia, J.G. (2010). *Determinants of online reporting of accounting information by Spanish local government authorities*. *Local Government Studies*, Vol. 36, No. 5, h. 679–695
- Ghozali, I. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 20*. Semarang:Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. dan A. Chariri. 2007. *Teori Akuntansi*. Semarang:Badan Penerbit Undip.
- Guillamón, M.D. F. Bastida dan B. Benito. 2011. *The determinants of local government's financial transparency*. *Local Government Studies*, Vol. 37, No. 4, h. 391–406

- Gujarati, D. N., dan Porter, Dawn C. 2009. *Basic Econometric: 5th Edition*. Boston: McGraw-Hill Irwin.
- Hartono, D. U dan Mulyanto, E. 2010. *Electronic Government Pemberdayaan Pemerintahan Dan Potensi Desa Berbasis Web*. *Jurnal Teknologi Informasi*, Vol. 6, No. 1, h. 9–21
- Hilmi A. Z dan Martani, D. 2010. "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi". *Simposium Nasional Akuntansi XV*, h. 1–26.
- Hiola, Y dan Rosidi, A.D.M. 2015. "Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Kepatuhan Pengungkapan Informasi Keuangan di Website dengan Opini Audit dan Lingkungan Politik Sebagai Pemoderasi (Studi Pada Pemerintah Provinsi, Kota, Dan Kabupaten di Sulawesi)". *Journal of Economics, Business, and Accountancy Ventura*, Vol. 19, No. 1, h. 27–36.
- Ingram, R. W. 1984. *Economic Incentives and the Choice of State Government Accounting Practices University of Chicago Stable Journal of Accounting Research*, Vol. 22 No. 1, h. 126–144.
- Jensen, M. C., dan Meckling, W. H. 1976. *Theory of the Firm: Managerial*. *Journal of Financial Economics*, Vol. 3, h. 305–360.
- Kaihatu. 2006. *Good Corporate Governance dan Penerapannya di Indonesia*. *Jurnal Ekonomi Manajemen*, Vol. 61, h. 407-415
- Kawedar, W., Rohman, A. dan Handayani, S. 2008. *Akuntansi Sektor Publik: Pendekatan Penganggaran Daerah dan Akuntansi Keuangan Daerah*. Semarang:Badan Penerbit Undip.
- Khasanah. 2014. Pengaruh Karakteristik, Kompleksitas, Dan Temuan Audit Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Diponegoro Journal of Accounting*, Vol. 3, No. 2, h. 864–874.
- Komite Nasional Kebijakan Governance. 2010. *General Guidance on Good Public Governance*.
- Kusumawati, D., dan Ratmono, D. 2017. Determinan Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia. *Diponegoro Journal of Accounting*, Vol. 6, No. 1, h. 1–15.
- Laswad, F., Fisher, R. dan Oyelere, P. 2005. *Determinants of voluntary Internet financial reporting by local government authorities*. *Journal of Accounting and Public Policy*, Vol. 24, No. 2, h. 101–121.

- Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi.
- Martani, D., Fitriyani, D. dan Annisa. 2014. *Financial and performance transparency on the local government websites in Indonesia*. *Journal of Theoretical and Applied Information Technology*, Vol. 60, No. 3, h. 504–516.
- Marfiana, N.. dan Kurniasih, L. 2013. “Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Hasil Pemeriksaan Audit Bpk Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota”. *Journal & Proceeding Universitas Jenderal Soedirman*, Vol.3 \, No. 1, h. 1-16.
- Medina, F. 2012. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Transparansi Informasi Keuangan Pada Website Resmi Pemerintah Daerah dDi Indonesia, Skripsi Tidak Dipublikasikan*, Universitas Indonesia.
- Nainggolan, A.T. dan Purwanti, D. 2012. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Transparansi Informasi Keuangan Daerah Via Website, h. 1–26.
- Patrick, P. A 2007. *"The Determinants of Organizational Innovativeness: The Adoption of GASB 34 in Pennsylvania Local Government"*. Disertasi Tidak Dipublikasikan, The Pennsylvania State University, PA.
- Pina, V., Torres, L., dan Royo, S. 2010. *"Is e-government promoting convergence towards more accountable local governments"*, *International Public Management Journal*, Vol. 13, No. 4, h. 350–380.
- Purwanti, R.E., Akram dan Suparman, L. 2017. *The Determinants Transparency And Accessibility Of Internet Financial Reporting*. *International Conference and Call for Papers*, h. 378–394.
- Rahman, P., Sutaryo, A. dan Budiatmo, A. 2013. *Determinan Internet Financial Reporting di Indonesia*. *Simposium Akuntansi Nasional XVI*, pp. 1299-1323.
- Ratmono, D. 2013. Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah di Internet: Pengujian Teori Institusional dan Keagenan. *Media Ilmiah Akuntansi*, Vol. 51, h. 28–48.
- Republik Indonesia (2003), Undang-Undang Nomor 17, Tentang Keuangan Negara.
- Republik Indonesia (2004a), Undang-Undang Nomor 32, Tentang Pemerintahan Daerah

- Republik Indonesia (2004b), Undang-Undang Nomor 33, Tentang Perimbangan Keuangan Negara.
- Republik Indonesia (2005a), Peraturan Pemerintah Nomor 24, Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Republik Indonesia (2005b), Peraturan Pemerintah Nomor 56, Tentang Sistem Informasi Keuangan daerah.
- Republik Indonesia (2008), Undang-Undang Nomor 14, Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Republik Indonesia (2010), Peraturan Pemerintah Nomor 71, Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Republik Indonesia (2011), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21, Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Republik Indonesia (2012), Instruksi Menteri Dalam Negeri RI Nomor 118-52/1797/SJ, Tahun Tentang Peningkatan Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah.
- Republik Indonesia (2016), Peraturan Pemerintah Nomor 18, Tentang Perangkat Daerah.
- Salle, A. 2016. Makna transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. *Jurnal Keuda*, Vol. 1, No. 1, h. 1–19.
- Sekaran, Uma dan Bougie, Roger. 2010. *Research Methods for Business-A Skill Building Approach-5th Edition*. United Kingdom: John Wiley&Sons Ltd.
- Setyaningrum, D. dan Syafitri, F. 2012. "Analisis Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan:", *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, Vol. 9, No.2 h. 154-170.
- Sudarsana, H.S. 2013. "Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Indonesia)". *Disertasi yang Tidak Dipublikasikan*, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Diponegoro.
- Styles, A. dan Tennyson, M. (2007). *The Accessibility Of Financial Reporting Of U.S. Municipalities On The Internet*. *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*, Vol.19, No. 1, h. 194–200.

- Suhardjanto, D. dan Yulianingtyas, R.R. 2010. "Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kepatuhan Pengungkapan Wajib Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Kabupaten/Kota di Indonesia)". h. 30–42.
- Sumarjo, H. 2010. "Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota di Indonesia)". *Skripsi Tidak Dipublikasikan*, Fakultas Ekonomi, Universitas Sebelas Maret.
- Trisnawati, M.D., dan Achmad, K. 2014. "Determinan Publikasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Melalui Internet". *Simposium Nasional Akuntansi 17*, pp.1-21
- Wicaksono, K. W. 2015. Akuntabilitas Organisasi Sektor Publik. *Jurnal Kebijakan & Administrasi Publik*, Vol. 19, No. 1, h. 1–16.
- Winarno, W.W. 2009. *Analisis Ekonometrika dan Statistika Dengan EViews*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Xiao, J. Z., dan Lymer, A. 2005. *A Conceptual Framework for Investigating the Impact of the Internet on Corporate Financial Reporting. The International Journal of Digital Accounting Research*, Vol. 5, No. 10, pp. 131–169.

Referensi website:

- <http://bpkad.banjarkab.go.id/index.php/2017/09/08/kualitas-laporan-keuangan/>.
Diakses tanggal 28 Oktober pukul 07.43
- <https://www.suara.com/news/2019/04/25/000500/aji-pemerintah-jakarta-paling-tidak-transparan-di-indonesia>
Diakses tanggal 25 September 2019 pukul 21.44
- <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20171009144724-78-247152/cuma-jakarta-yang-tak-kantongi-dana-alokasi-pemerintah-pusat>.
Diakses tanggal 31 Januari 2020 pukul 13.11
- <https://www.alamatbank.com/kode-singkatan-nama-provinsi/>.
Diakses 31 Januari 2020 pukul 15.15